

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah Proses perubahan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota (Kuncoro, 2004). Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik yang berlangsung pada level makro maupun mikro. Tujuan pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi.

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan per kapita masyarakat dalam suatu negara yang berlangsung dalam jangka panjang. Pembangunan diartikan sebagai peningkatan produk nasional (GDP, GNP) yang disebabkan bukan saja oleh peningkatan kuantitas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi melainkan digunakannya sistem dan teknologi baru (Hudiyanto, 2001).

Menurut Sukirno (1994) pembangunan adalah suatu hal yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan suatu negara, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Pembangunan dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan dan melibatkan kegiatan produksi.

Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sisi ekonomi maupun sisi sosial. Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri yaitu menciptakan kesempatan dan lapangan kerja semaksimal mungkin supaya angkatan kerja yang berada di dalam suatu negara tersebut dapat terserap dalam proses kegiatan ekonomi di negara tersebut. Di lain sisi tujuan dari pembangunan ekonomi ialah terciptanya pertumbuhan serta peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Tenaga kerja merupakan salah satu komponen sumberdaya pembangunan. Tenaga kerja memiliki dua peran sekaligus dalam pembangunan yaitu sebagai pelaku pembangunan dan sasaran pembangunan. Pembangunan dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan Tenaga kerja atau masyarakat dalam arti luas.

Demikian strategis peran tenaga kerja dalam proses pembangunan sehingga segala problematika yang terkait dengan tenaga kerja baik dari sisi kuantitas maupun kualitas perlu di telaah dan dicarikan solusi pemecahannya.

Pengangguran merupakan masalah yang kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak mudah untuk dipahami. Menurut Samuleson (2008), pengangguran yang tinggi termasuk kedalam masalah ekonomi dan masalah sosial. Pengangguran merupakan masalah ekonomi karena ketika angka pengangguran meningkat,

sebagai dampaknya suatu Negara membuang barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran. Pengangguran juga merupakan masalah sosial yang besar karena mengakibatkan penderitaan yang besar untuk pekerja yang menganggur yang harus berjuang dengan pendapatan yang berkurang. Biaya ekonomi dari pengangguran jelas besar, namun tidak ada jumlah mata uang yang dapat mengungkapkan secara tepat tentang korban psikologi dan manusia pada saat mereka menganggur.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka masih berfluktuatif pada tahun 2019 hingga tahun 2023 di Indonesia. Salah satu daerah yang mengalami masalah pengangguran adalah Provinsi Jawa Timur. Pada tabel berikut dapat dilihat kondisi pengangguran Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2019-2023.

Tabel 1.1.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Pacitan	0.91	2.28	2.04	3.65	1.83
Kabupaten Ponorogo	3.50	4.45	4.38	5.51	4.66
Kabupaten Trenggalek	3.36	4.11	3.53	5.37	4.52
Kabupaten Tulungagung	3.29	4.61	4.91	6.65	5.65
Kabupaten Blitar	3.05	3.82	3.66	5.45	4.91
Kabupaten Kediri	3.58	5.24	5.15	6.83	5.79
Kabupaten Malang	3.70	5.49	5.40	6.57	5.70
Kabupaten Lumajang	2.73	3.36	3.51	4.97	3.67
Kabupaten Jember	3.69	5.12	5.44	4.06	4.01
Kabupaten Banyuwangi	3.95	5.34	5.42	5.26	4.75
Kabupaten Bondowoso	2.86	4.13	4.46	4.32	4.15
Kabupaten Situbondo	2.77	3.85	3.68	3.38	3.27
Kabupaten Probolinggo	3.77	4.86	4.55	3.25	3.24
Kabupaten Pasuruan	5.22	6.24	6.03	5.91	5.48
Kabupaten Sidoarjo	4.62	10.97	10.87	8.80	8.05
Kabupaten Mojokerto	3.61	5.75	5.54	4.83	4.67
Kabupaten Jombang	4.28	7.48	7.09	5.47	4.66
Kabupaten Nganjuk	3.16	4.80	4.98	4.74	4.68
Kabupaten Madiun	3.52	4.80	4.99	5.84	5.14
Kabupaten Magetan	2.98	3.74	3.86	4.33	4.16
Kabupaten Ngawi	3.60	5.44	4.25	2.48	2.41
Kabupaten Bojonegoro	3.56	4.92	4.82	4.69	4.63
Kabupaten Tuban	2.70	4.81	4.68	4.54	4.40
Kabupaten Lamongan	3.89	5.13	4.90	6.05	5.46
Kabupaten Gresik	5.40	8.21	8.00	7.84	6.82
Kabupaten Bangkalan	5.62	8.77	8.07	8.05	6.18
Kabupaten Sampang	2.71	3.35	3.45	3.11	2.72
Kabupaten Pamekasan	2.26	3.49	3.10	1.40	1.74
Kabupaten Sumenep	2.08	2.84	2.31	1.36	1.71
Kota Kediri	4.15	6.21	6.37	4.38	4.06
Kota Blitar	4.54	6.68	6.61	5.39	5.24
Kota Malang	5.88	9.61	9.65	7.66	6.80
Kota Probolinggo	4.25	6.70	6.55	4.57	4.53
Kota Pasuruan	4.89	6.33	6.23	6.18	5.64
Kota Mojokerto	2.63	6.74	6.87	5.05	4.73
Kota Madiun	3.96	8.32	8.15	6.39	5.85
Kota Surabaya	5.76	9.79	9.68	7.62	6.76
Kota Batu	2.42	5.93	6.57	8.43	4.52
Jawa Timur	3.82	5.84	5.74	5.49	4.88

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, 2024

Dalam pembangunan ekonomi pengangguran merupakan isu penting di

Provinsi Jawa Timur dan beberapa indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain PDRB, Tingkat Upah, Inflasi, Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Investasi Penanaman Modal asing (PMA).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Peran daerah dalam mendukung perekonomian nasional cukup besar namun terkadang tidak sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional, peran tersebut menjadi beban optimal. Fenomena perekonomian saat ini cenderung menuntut adanya peran aktif dari para eksekutif untuk lebih banyak menggali potensi perekonomian daerahnya serta memainkan peranan yang lebih besar dalam merangsang aktivitas ekonomi daerah. (safitri, 2011). Pada kenyataannya, PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB suatu wilayah meningkat, maka jumlah output dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Output yang jumlahnya meningkat akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan tenaga kerja (Burhanudin, 2015). Pada tabel berikut dapat dilihat kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2019-2023.

Table 1.2
PDRB Kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Pacitan	5.08	-1.84	2.49	5.54	4.46
Kabupaten Ponorogo	5.01	-0.90	3.19	3.24	5.14
Kabupaten Trenggalek	5.08	-2.17	3.65	4.52	4.92
Kabupaten Tulungagung	5.32	-3.09	3.53	5.22	4.91
Kabupaten Blitar	5.12	-2.29	3.02	5.20	4.45
Kabupaten Kediri	5.06	-2.41	3.06	4.90	4.53
Kabupaten Malang	5.49	-2.68	3.12	5.13	5.00
Kabupaten Lumajang	4.61	-2.79	3.14	4.43	5.00
Kabupaten Jember	5.51	-2.98	4.00	4.53	4.93
Kabupaten Banyuwangi	5.55	-3.58	4.09	4.43	5.03
Kabupaten Bondowoso	5.30	-1.36	3.49	3.51	4.62
Kabupaten Situbondo	5.44	-2.33	3.26	4.39	4.90
Kabupaten Probolinggo	4.56	-2.12	3.35	4.52	4.73
Kabupaten Pasuruan	5.83	-2.03	4.34	5.32	5.21
Kabupaten Sidoarjo	5.99	-3.69	4.21	7.53	6.16
Kabupaten Mojokerto	5.81	-1.11	4.12	5.82	5.15
Kabupaten Jombang	5.10	-1.98	3.24	5.37	5.04
Kabupaten Nganjuk	5.36	-1.71	3.61	4.84	5.40
Kabupaten Madiun	5.42	-0.12	3.32	4.32	5.12
Kabupaten Magetan	5.04	-1.64	3.04	3.89	4.47
Kabupaten Ngawi	5.05	-1.69	2.55	3.19	4.49
Kabupaten Bojonegoro	6.34	-0.40	-5.54	-6.16	2.47
Kabupaten Tuban	5.14	-5.85	3.00	8.88	4.36
Kabupaten Lamongan	5.43	-2.65	3.43	5.56	4.28
Kabupaten Gresik	5.42	-3.68	3.79	7.38	4.62
Kabupaten Bangkalan	1.03	-5.59	-2.07	-1.12	1.20
Kabupaten Sampang	1.85	-0.29	0.22	2.31	2.56
Kabupaten Pamekasan	4.92	-2.54	3.41	4.66	4.96
Kabupaten Sumenep	0.14	-1.13	2.61	3.11	5.35
Kota Kediri	5.47	-6.25	2.50	3.96	1.92
Kota Blitar	5.84	-2.28	4.28	5.22	5.29
Kota Malang	5.73	-2.26	4.21	6.32	6.07
Kota Probolinggo	5.94	-3.64	4.06	6.12	6.04
Kota Pasuruan	5.56	-4.33	3.64	6.22	5.65
Kota Mojokerto	5.65	-3.69	3.65	5.56	2.79
Kota Madiun	5.69	-5.34	4.79	5.52	5.80
Kota Surabaya	6.09	-4.85	4.29	6.51	5.70
Kota Batu	6.51	-6.46	4.04	6.18	6.19
Jawa Timur	5.53	-2.33	3.56	5.34	4.95

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, 2024

Keynes menjelaskan penurunan tingkat upah akan menurunkan pendapatan, sehingga akan menurunkan daya beli masyarakat termasuk pengeluaran agregat

masyarakat, dampaknya kapasitas produksi yang berlebih dari produsen yang akan dijual kepada masyarakat akan menjadi mubazir dan merugikan perusahaan. Sehingga perusahaan akan memberhentikan tenaga kerjanya dan penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) tidak akan tercapai (Putong, 2007). Apabila tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran. Dimana, pemerintah masih meyakini bahwa upah minimum juga merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki nasib pekerja yang mempunyai penghasilan rendah. Indonesia tidak mungkin menyerahkan penetapan upah pekerja atau buruh kepada mekanisme pasar, hal ini disebabkan di dalam pasar tenaga kerja masih terlihat ketidakseimbangan struktural. Setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Pada tabel berikut dapat dilihat kondisi Upah Minimum Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2019-2023.

Table 1.3
UMK Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023

Kabupaten/kota	Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jawa Timur	163.059,05	1.768.777,00	1.868.777,08	1.891.567,12	2.040.244,30
Kab. Pacitan	1.763.267,65	1.913.321,73	1.961.154,77	1.961.154,77	2.157.270,25
Kab. Ponorogo	1.763.267,65	1.913.321,73	1.938.321,73	1.954.281,32	2.149.709,45
Kab. Trenggalek	1.763.267,65	1.913.321,73	1.938.321,73	1.944.932,74	2.139.426,01
Kab. Tulungagung	1.805.219,94	1.958.844,16	2.010.000,00	2.029.358,67	2.229.358,67
Kab. Blitar	1.801.406,09	1.954.705,75	2.004.705,75	2.015.071,18	2.215.071,18
Kab. Kediri	1.850.986,07	2.008.504,16	2.033.504,99	2.043.422,93	2.243.422,93
Kab. Malang	2.781.564,24	3.018.530,66	3.068.275,36	3.068.275,36	3.268.275,36
Kab. Lumajang	1.826.831,72	1.982.295,10	1.982.295,10	2.000.607,20	2.200.607,20
Kab. Jember	2.170.917,80	2.456.302,97	2.355.662,91	2.355.662,91	2.555.662,91
Kab. Banyuwangi	2.132.779,35	2.319.796,75	2.314.278,87	2.328.899,12	2.528.899,12
Kab. Bondowoso	1.801.406,09	1.954.705,75	1.954.705,75	1.958.640,12	2.154.504,13
Kab. Situbondo	1.763.267,65	1.913.321,73	1.938.321,73	1.942.750,77	2.137.025,85
Kab. Probolinggo	2.306.944,93	2.503.265,94	2.553.265,95	2.553.265,95	2.753.265,95
Kab. Pasuruan	3.861.518,00	4.190.133,19	4.290.133,19	4.365.133,19	4.515.133,19
Kab. Sidoarjo	3.864.696,20	4.193.581,85	4.293.581,85	4.368.581,85	4.518.581,85
Kab. Mojokerto	3.851.983,38	4.179.787,17	4.279.787,17	4.354.787,17	4.504.787,17
Kab. Jombang	2.445.945,88	2.794.801,59	2.654.095,88	2.654.095,88	2.854.095,88
Kab. Nganjuk	1.801.406,09	1.954.705,75	1.954.705,75	1.970.006,41	2.167.007,05
Kab. Madiun	1.763.267,65	1.913.321,73	1.951.588,16	1.958.410,31	2.154.251,34
Kab. Magetan	1.763.267,65	1.913.321,73	1.938.321,73	1.957.329,43	2.153.062,37
Kab. Ngawi	1.763.267,65	1.913.321,73	1.960.510,00	1.962.585,99	2.158.844,59
Kab. Bojonegoro	1.858.613,77	2.016.780,00	2.066.781,80	2.079.568,07	2.279.568,07
Kab. Tuban	2.333.641,85	2.654.095,87	2.532.234,77	2.539.224,88	2.739.224,88
Kab. Lamongan	2.233.641,85	2.314.278,87	2.488.724,77	2.501.977,27	2.701.977,27
Kab. Gresik	3.867.874,40	4.197.030,51	4.297.030,51	4.372.030,51	4.522.030,51
Kab. Bangkalan	1.801.406,09	1.954.705,75	1.954.705,75	1.956.773,48	2.152.450,83
Kab. Sampang	1.763.267,65	1.913.321,73	1.938.321,73	1.922.122,97	2.114.335,27
Kab. Pamekasan	1.763.267,65	1.913.321,73	1.938.321,73	1.939.686,39	2.133.655,03
Kab. Sumenep	1.801.406,09	1.954.705,75	1.954.705,75	1.978.927,22	2.176.819,94
Kota Kediri	1.899.294,78	2.060.925,00	2.085.924,76	2.118.116,63	2.318.116,63
Kota Blitar	1.801.406,09	1.954.635,76	2.004.705,75	2.039.024,44	2.239.024,44
Kota Malang	2.668.420,18	2.895.502,74	2.970.502,73	2.994.143,98	3.194.143,98
Kota Probolinggo	2.137.864,48	2.355.662,90	2.350.000,00	2.376.240,63	2.576.240,63
Kota Pasuruan	2.575.616,61	2.532.234,77	2.819.801,59	2.838.837,64	3.038.837,64
Kota Mojokerto	2.263.665,07	2.423.724,77	2.481.302,97	2.510.452,36	2.710.452,36
Kota Madiun	1.801.406,09	1.954.705,75	1.954.705,75	1.991.105,79	2.190.216,37
Kota Surabaya	3.871.052,61	4.200.479,19	4.300.479,19	4.375.479,19	4.525.479,19
Kota Batu	2.575.616,61	2.794.800,00	2.819.801,59	2.830.367,09	3.030.367,09

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, 2024

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu (Sukirno, 1994:27). Semakin tingginya tingkat inflasi yang terjadi maka akan berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun sehingga akan terjadi peningkatan terhadap angka pengangguran. Teori A.W. Phillips muncul karena pada saat tahun 1929, terjadi depresi ekonomi Amerika Serikat, hal ini berdampak pada kenaikan inflasi yang tinggi dan diikuti dengan pengangguran yang tinggi pula. berdasarkan pada fakta itulah A.W. Phillips mengamati hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Dari hasil pengamatannya, ternyata ada hubungan yang erat antara Inflasi dengan tingkat pengangguran, jika inflasi tinggi, pengangguran pun akan rendah. Hasil pengamatan Phillips ini dikenal dengan kurva Phillip (Arief, 2014). Pada table berikut dapat dilihat Tingkat Inflasi tahun ke tahun (YoY) Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2019-2023.

Tabel 1.4
Inflasi di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023

Bulan	Inflasi Tahun ke Tahun (YoY) (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	2.60	2.02	1.25	2.60	6.41
Februari	2.24	2.54	1.16	2.42	6.47
Maret	2.35	2.27	1.29	3.04	6.13
April	2.58	1.83	1.52	4.01	5.35
Mei	2.70	1.83	1.61	4.24	5.02
Juni	2.40	2.04	1.19	4.92	4.59
Juli	2.50	1.50	1.65	5.39	4.11
Agustus	2.51	1.39	1.88	5.20	4.13
September	2.45	1.30	1.92	6.80	3.01
Oktober	2.24	1.39	2.13	6.65	3.25
November	2.20	1.50	2.22	6.62	3.24
Desember	2.86	1.44	2.45	6.52	2.92

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, 2024

Menurut Hanan (2014) investasi mempunyai arti penting didalam penyerapan tenaga kerja, karena dengan adanya investasi, baik nasional maupun asing, akan meningkatkan atau menghidupkan kembali sektor riil, dengan demikian juga akan menyerap tenaga kerja sehingga dengan adanya investasi ini akan membuka lapangan kerja baru. Dengan demikian, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Menurut Mulyadi dalam Fathi (2021) mengatakan bahwa Teori Harrod-Domar menjelaskan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga meningkatkan aktivitas produksi. Tingkat penanaman modal akan mempengaruhi bagaimana suatu negara akan bertumbuh dan berkembang. Sehingga proses ini nantinya akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka pengangguran. Pada table berikut dapat dilihat data Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Realisasi Investasi Penanaman Modal asing (PMA) Kabupaten/kota di Jawa Timur dari Tahun 2019-2023.

Tabel 1.5
Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Bangkalan	0,04	0,043	0,01	0,09	0,21
Kabupaten Banyuwangi	0,33	0,637	0,77	2,09	3,43
Kabupaten Blitar	1,45	0,017	0,23	0,31	0,18
Kabupaten Bojonegoro	0,04	0,076	0,09	0,33	0,34
Kabupaten Bondowoso	0,04	0,157	0,09	0,26	0,09
Kabupaten Gresik	3,20	14,411	8,27	6,75	9,68
Kabupaten Jember	0,25	0,159	0,09	0,31	0,74
Kabupaten Jombang	0,36	0,148	1,00	0,85	1,29
Kabupaten Kediri	2,58	2,285	1,99	2,36	2,45
Kabupaten Lamongan	0,26	0,124	0,21	0,82	1,54
Kabupaten Lumajang	0,19	0,254	0,06	0,88	1,15
Kabupaten Madiun	0,31	2,120	0,29	0,23	0,43
Kabupaten Magetan	-	0,380	0,05	0,12	0,23
Kabupaten Malang	4,66	1,160	1,21	2,54	2,57
Kabupaten Mojokerto	1,12	1,367	0,86	3,13	2,59
Kabupaten Nganjuk	0,12	0,120	0,23	0,25	0,56
Kabupaten Ngawi	0,00	0,460	0,27	0,43	0,49
Kabupaten Pacitan	0,09	0,092	0,07	0,08	0,08
Kabupaten Pamekasan	0,00	0,037	0,14	0,09	0,05
Kabupaten Pasuruan	7,94	4,432	2,13	5,77	5,50
Kabupaten Ponorogo	0,04	0,008	0,16	0,30	0,19
Kabupaten Probolinggo	8,14	3,586	0,37	0,73	2,84
Kabupaten Sampang	-	0,001	0,01	0,08	0,02
Kabupaten Sidoarjo	3,54	5,418	4,28	9,17	12,33
Kabupaten Situbondo	0,08	0,012	0,02	0,10	0,38
Kabupaten Sumenep	0,00	0,004	0,02	0,06	0,03
Kabupaten Trenggalek	0,01	0,031	0,04	0,05	0,04
Kabupaten Tuban	0,07	0,370	0,33	1,27	1,54
Kabupaten Tulungagung	0,10	0,109	0,12	0,03	0,17
Kota Batu	0,21	0,167	0,05	0,06	0,18
Kota Blitar	0,01	0,015	0,03	0,04	0,09
Kota Kediri	0,16	1,363	1,64	0,24	0,33
Kota Madiun	0,10	0,021	0,08	0,07	0,26
Kota Malang	0,52	0,229	0,64	0,67	1,92
Kota Mojokerto	-	0,008	0,31	0,15	0,22
Kota Pasuruan	0,00	0,002	0,01	0,02	0,10
Kota Probolinggo	0,03	0,014	0,03	0,05	0,38
Kota Surabaya	9,46	15,820	26,37	24,56	20,30
JAWA TIMUR	45,45	55,661	52,55	65,36	74,94

Sumber : DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur, 2024

Tabel 1.6
Realisasi Investasi Penanaman Modal asing (PMA)
Kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
JAWA TIMUR	12,99	22,69	26,85	44,97	70,17
Kabupaten Bangkalan	-	-	-	0,02	-
Kabupaten Banyuwangi	0,17	0,91	0,00	0,12	0,23
Kabupaten Blitar	0,20	0,09	0,14	0,02	0,10
Kabupaten Bojonegoro	-	0,00	0,01	0,04	0,03
Kabupaten Bondowoso	0,02	0,74	0,15	0,16	0,90
Kabupaten Gresik	1,48	2,04	8,48	24,84	39,78
Kabupaten Jember	1,44	1,28	0,32	0,91	0,18
Kabupaten Jombang	3,01	1,60	0,12	0,62	0,30
Kabupaten Kediri	0,00	0,0013	0,01	0,02	0,04
Kabupaten Lamongan	0,12	0,36	0,17	1,05	0,44
Kabupaten Lumajang	0,04	0,002	0,00	0,03	0,07
Kabupaten Madiun	0,04	0,16	0,14	0,19	1,00
Kabupaten Magetan	-	-	-	-	0,03
Kabupaten Malang	0,07	0,04	0,63	2,50	1,29
Kabupaten Mojokerto	1,62	1,72	1,09	1,31	1,38
Kabupaten Nganjuk	0,00	0,02	0,03	0,02	0,06
Kabupaten Ngawi	0,00	0,14	0,01	0,13	0,30
Kabupaten Pacitan	-	0,00	0,00	0,01	0,00
Kabupaten Pamekasan	0,00	0,0004	0,00	0,01	0,00
Kabupaten Pasuruan	1,97	3,51	5,01	3,55	15,25
Kabupaten Ponorogo	0,02	-	0,00	0,00	0,01
Kabupaten Probolinggo	0,18	0,140	0,06	0,41	1,35
Kabupaten Sampang	-	-	-	-	0,01
Kabupaten Sidoarjo	1,07	1,39	5,33	4,92	1,35
Kabupaten Situbondo	0,01	0,131	0,10	0,09	0,05
Kabupaten Sumenep	-	0,00	0,01	0,00	-
Kabupaten Trenggalek	-	-	-	-	0,00
Kabupaten Tuban	0,04	5,73	2,11	1,25	2,70
Kabupaten Tulungagung	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Kota Batu	0,00	0,011	0,01	0,02	0,00
Kota Blitar	0,00	0,001	0,00	0,00	0,00
Kota Kediri	0,01	0,003	0,00	0,00	0,06
Kota Madiun	0,00	0,188	0,00	0,01	0,00
Kota Malang	0,04	0,07	0,03	0,03	0,16
Kota Mojokerto	0,00	0,00	-	-	0,00
Kota Pasuruan	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Kota Probolinggo	0,00	1,378	0,05	0,17	0,10
Kota Surabaya	1,43	1,01	2,82	2,54	2,97

Sumber : DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan fenomena yang terjadi menunjukkan naik turunnya perkembangan PDRB, Tingkat Upah, Inflasi, Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Investasi Penanaman Modal asing (PMA) setiap tahunnya tidak selalu mempengaruhi pengangguran Kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini juga didukung beberapa teori dikemukakan oleh para ahli dan peneliti sebelumnya yang belum sepenuhnya terbukti. Dengan demikian penulis ingin mencari kebenaran ada tidaknya pengaruh antara PDRB, Tingkat Upah, Inflasi, Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Investasi Penanaman Modal asing (PMA) terhadap pengangguran. Maka dari itu, penulis lebih lanjut akan menganalisis penelitian ini lebih jauh dalam bentuk tesis dengan judul “Determinan Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota di Jawa Timur Periode 2019-2023: Analisis Data Panel”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap variabel tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota di Jawa Timur
2. Apakah variabel Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) berpengaruh terhadap variabel tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota di Jawa Timur

3. Apakah variabel Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap variabel tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota di Jawa Timur
4. Apakah variabel Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh terhadap variabel tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota di Jawa Timur
5. Apakah variabel Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh terhadap variabel tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota di Jawa Timur

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) terhadap tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota di Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota di Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota di Jawa Timur.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota di Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian tentang pengangguran. Adapun manfaat penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis

- ✓ Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pengembangan dalam penelitian ilmiah khususnya penelitian yang meneliti topik mengenai pengangguran
- ✓ Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa atau dosen sebagai referensi atau acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dan menjadi bahan perbandingan yang berkaitan dengan topik yang sama yaitu permasalahan makro tentang pengangguran.

2. Secara praktis

- ✓ Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan acuan bagi stakeholder terkait dalam mengambil sebuah kebijakan khususnya pada pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Timur dalam mengupayakan pengurangan jumlah pengangguran di Propinsi Jawa Timur.
- ✓ Penelitian ini diharapkan dijadikan acuan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini fokus pada Pengaruh PDRB, Tingkat Upah, Inflasi, Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Investasi Penanaman Modal asing (PMA) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2019-2023.